

PENDIDIKAN LINGKUNGAN DAN JALAN TENGAH KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

Bendi Juantara¹, Indra Bulan²

¹⁾ Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

²⁾ Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Lampung

ABSTRAK

Sejak Indonesia masuk dalam sistem kapitalisme global, kepentingan Indonesia untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama. Namun demikian kebijakan yang diciptakan justru dilematis karena telah mengorbankan masalah lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam di Indonesia telah dilakukan secara massif, terstruktur dan sistematis sehingga berimplikasi pada kerusakan lingkungan. Walaupun hingga saat ini telah muncul upaya jalan tengah seperti konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs), tetapi orientasi ekonomi tetap dominan terutama dalam kemudahan izin investasi SDA di daerah. Diplomasi lingkungan yang dituangkan dalam pendidikan lingkungan sangat diperlukan dalam upaya peletakan nilai-nilai baru pengelolaan sumber daya alam. Tulisan ini akan menguraikan problematika pengelolaan SDA dan analisis aktor, dampak terhadap lingkungan, hingga gagasan untuk mengimplementasi pendidikan lingkungan terintegrasi pada tiga subjek yakni Mendorong Aktivisme Masyarakat Pro Lingkungan, Pengembangan Kurikulum pendidikan lingkungan di sekolah partai politik, dan Pendekatan politik pro lingkungan dalam proses kebijakan.

Kata Kunci: Ekonomi Politik, Pendidikan Lingkungan, Kebijakan Sumber Daya Alam

ABSTRACT

Since Indonesia entered the global capitalist system, Indonesia's interest in enhancing economic stability and growth has become a top priority. However, the policies created are in a dilemma because they have sacrificed environmental problems. The exploitation of natural resources in Indonesia has been carried out massively, structurally and systematically, which has implications for environmental damage. Even though until now there have been middle-way efforts such as the concept of Sustainable Development Goals (SDGs), the economic orientation remains dominant, especially in terms of facilitating natural resource investment permits in the regions. Environmental diplomacy as outlined in environmental education is indispensable in an effort to lay down new values in natural resource management. This paper will describe the problems of natural resource management and actor analysis, the impact on the environment, to the idea of implementing integrated environmental education on three subjects, namely Encouraging Pro-Environmental Community Activism, Development of Environmental Education Curriculum in political party schools, and pro-environmental political approaches in the policy process

Keywords: Political Economy, Environmental Education, Natural Resources Sector Policy

PENDAHULUAN

Sumber Daya Alam (SDA) pada dasarnya merupakan sumber kekayaan bumi yang menyediakan kebutuhan umat manusia untuk menunjang sistem kehidupan, baik untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun kesejahteraan manusia itu sendiri. Namun demikian tidak semua sumber daya alam dapat dieksploitasi secara terus menerus karena jenisnya yang tidak dapat diperbaharui, hingga fungsinya sebagai penyeimbang lingkungan. Besarnya manfaat sumber daya alam tersebut membuat SDA menjadi sumber daya yang strategis yang harus dipelihara dan dijaga pelestariannya. Manusia sebagai subjek pengelola perlu secara bijaksana dan kesadaran yang tinggi memperhatikan pengelolaan SDA agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga.

Namun pada pelaksanaannya justru SDA yang disajikan “gratis” tersebut nyatanya dikonversi secara besar-besaran menjadi objek komoditas baru yang dikembangkan secara ekonomi. Hal ini paling tidak terlihat dari menguatnya kapitalisme global yang telah mendorong banyak negara berlomba-lomba melakukan eksplorasi sumber daya alam dengan orientasi penuh ambisi ekonomi. Bahkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditawarkan dalam sistem kapitalisme telah membuka “*karpas merah*” bagi kepentingan investor/pemilik modal untuk menguasai dan mengeruk seluruh potensi ekonomi pada sumber daya alam hingga di level terkecil (di daerah-daerah). paling tidak *privilege* tersebut dapat dilihat dari minimnya perdebatan politis yang serius, tajam dan kritis, tuntas dan menyeluruh dalam proses kebijakan pengelolaan SDA. Kalau pun ada maka hanyalah retorika politik dimana semuanya didominasi lobi dan kompromi. (Saeng, 2012: 281).

Sejak Indonesia masuk dalam sistem kapitalisme global, kepentingan Indonesia untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama. Terutama di era kekuasaan orde baru, Eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara massif, terstruktur dan sistematis. Namun sayangnya kekuasaan Orba telah menciptakan predator politik di lingkaran kekuasaan Suharto dengan saling berkontestasi menanamkan pengaruh kepada mengeruk keuntungan secara pribadi melalui pemanfaatan lembaga Negara dan program pembangunan nasional. Para Oligark ini memonopoli aturan main, dan berusaha menguasai

seluruh asset dan keuangan milik negara dengan cara curang dengan tujuan utama yakni untuk keuntungan pribadi. (Hadiz, 2004)

Meskipun jatuhnya rezim soeharto dimasa transisi 1998 digadang-gadang menjadi tonggak awal perbaikan demokrasi dan perubahan pola pengelolaan sumber daya alam. Namun demikian, secara umum kelompok elite kuat yang tadinya dalam lingkaran Soeharto mampu bertransformasi dan beradaptasi dengan membentuk pola baru kekuasaan, Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, para elit ini memindahkan lokus perilaku predatoris kebawah dengan mencoba memonopoli sejumlah lembaga daerah beserta seluruh potensi alam daerah tersebut untuk dimanfaatkan secara pribadi oleh kelompok elite tersebut. (Hadiz 2010, Robinson dan Hadiz 2004). sejatinya telah muncul upaya mendorong aktor alternatif untuk turut berperan langsung dalam pertarungan meraih jabatan politik dengan harapan dapat mampu memperbaiki bekerjanya representasi popular, namun nyatanya konsolidasi elit semakin "menjadi-jadi". Meskipun kinerja institusi berjalan baik tetapi tidak diimbangi dengan meningkatnya hak-hak rakyat yang terus mengalami kemunduran (Torquist, 2009) Dominasi elit tersebut memanfaatkan politik klientelistik sebagai jembatan untuk memediasi ketimpangan kelas antara elit dan kaum masyarakat miskin dengan sesekali memberikan bantuan berupa uang dan barang terutama mengambil perhatian mereka dimenit-menit menjelang pemilihan. Sedangkan partai politik tidak memiliki kecendrungan untuk mengontrol peran eksekutif dan legislatif yang terpilih, alih-alih justru melelang posisi slot kekuasaan tersebut kepada penawar yang lebih tinggi pada saat menjelang pemilihan umum dengan iming-iming dapat menguasai sumber-sumber perekonomian daerah. (Hadiz 2004)

Namun demikian praktek klientelisme dan korupsi dalam politik formal yang terjadi di Indonesia tidak hanya dilihat sebagai sebuah tanda-tanda patologi, hal ini karena bukan saja politik klientelistik dapat mendominasi hasil-hasil pemilu dan kunci menuju kesuksesan politik tapi juga menentukan bagaimana bekerjanya institusi-institusi negara dan karakter pemerintahan (Aspinall, E., & Berenschot, W. 2019). Paling tidak praktik keberpihakan dan keramahan pada investor politik Indonesia dapat terlihat dari banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan kaum elit ekonomi.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2018 menunjukkan beberapa objek sumber daya alam seperti hutan, perkebunan sawit, tambang, dan perikanan mengalami persoalan serius dalam hal pengelolaannya. Peran aktor oligark begitu kuat dalam hal penguasaan, hal ini terlihat dari banyaknya penguasaan lahan dan konflik yang hadir antara petani/pekebun dengan perusahaan maupun aktor oligark. Berbagai upaya dilakukan demi mengamankan kepentingan, mulai dari memainkan politik uang dalam peralihan kekuasaan hingga menggunakan aksi premanisme disejumlah daerah.

Tabel. 1 Potensi Sumber Daya Alam yang dikuasai Aktor Oligark

No	Potensi Sumber Daya Alam	Dikuasai Oligark	Dikuasai Petani
1	Kehutanan	38.714.172 Ha	1.748931 Ha
2	Kebun Kelapa Sawit	2.535.495 Ha (10 Perusahaan)	4.756.272 Ha (2,1 Juta Pekebun)
3	dst		

Sumber: Data KPK 2018

Potensi penguasaan SDA oleh elit politik dan ekonomi semakin menguat di hampir seluruh daerah strategis di Indonesia juga ditunjang oleh gagalnya pemerintah dalam menentukan dasar-dasar keberhasilan pembangunan di daerah, data rilis Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia periode 2019 menunjukkan dari peta indeks daya saing daerah hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa seperti Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan kemudahan investasi sangat tinggi, hanya Provinsi Banten yang menengah dalam daya saing daerah. sedangkan di Pulau Sumatera, dari sepuluh Provinsi yang ada, Provinsi Lampung dan Provinsi Riau mendominasi jika dibandingkan provinsi lainnya dalam kemudahan investasi, begitupun juga di Provinsi lain seperti Kalimantan Timur, serta Sulawesi selatan.

Gambar 1. Data Indeks Daya Saing Daerah Wilayah Provinsi Periode 2019



Sumber Data: data diolah dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

Implikasi dari kasus diatas nyatanya telah berdampak pasti pada kerusakan lingkungan di Indonesia, hampir diseluruh provinsi yang tinggi kemudahan investasi, terjadi banyak bencana ekologis. Hasil rilis data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total 1.724 bencana telah melanda Indonesia sepanjang tahun 2020. Bencana yang terjadi telah mengakibatkan 257 orang meninggal dunia dan lebih dari 3,7 juta orang terdampak dan mengungsi. sebagian besar bencana didominasi banjir, angin puting beliung dan tanah longsor. BNPB juga mencatat terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebanyak 163 kejadian, dan 10 kejadian kekeringan terjadi sepanjang 2020 (BNPB 2020). sebagian besar bencana terkonsentrasi didaerah-daerah yang iklim investasi dan akselerasi pembangunan sangat tinggi seperti provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menelusuri data dari berbagai kasus yang telah dirilis oleh Pemberantasan Korupsi KPK terkait alam kebijakan sumber daya (SDA) dan dominasi kapitalis dalam akses ke sumber daya alam (SDA). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan sekunder dengan meninjau dokumen dan tinjauan pustaka, buku review, hukum, jurnal, dan artikel internet. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah sumber daya alam, manajemen dan analisis aktor, dampaknya lingkungan, serta gagasan penerapan pendidikan lingkungan terintegrasi dalam

tiga saluran, yaitu mendorong aktivisme komunitas masyarakat pro lingkungan, pengembangan kurikulum pendidikan lingkungan di sekolah partai politik, dan pendekatan politik pro-lingkungan dalam proses kebijakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Sejauh ini KPK menyadari bahwa praktik persoalan korupsi SDA adalah bagian dari kuatnya politik klientelistik dan jaringan politik informal yang dipelihara oleh kekuasaan. Segelintir kelompok aktor (pribadi atau organisasi) telah memanfaatkan jaringan informal untuk mengatur dan membangun pola penguasaan terhadap system dan struktur kuasa. Bahkan Kekuatan aktor informal ini nyatanya dapat menekan Negara untuk memenuhi semua keinginan dan kepentingan mereka, dan pada akhirnya kepentingan rakyat harus dikorbankan (KPK,2018).

Temuan KPK menunjukan perizinan merupakan salah satu wilayah rentan korupsi dalam pengelolaan SDA di Indonesia yang perlu dilakukan penataan, namun para intelektual indonesia seperti Dewi Tresya, dkk (2020) melihat bahwa proses penataan perizinan belum menyasar pada perizinan lingkungan, padahal perizinan lingkungan adalah alat pengendalian yang sentral dalam rangka penyelamatan sumber daya alam. Selain itu izin sosial belum dilihat sebagai elemen penting dalam penataan perizinan padahal Izin sosial merupakan legitimasi yang terbit dari penilaian masyarakat. Izin sosial terpenuhi ketika masyarakat luas telah menerima kegiatan usaha tersebut (Cullen-Knox C.et al.,2017), hal lain juga seperti penertiban izin belum dapat berjalan hingga ke akar rumput, hingga lemahnya sistem perizinan sebagai sistem pengendalian pengelolaan sumber daya alam. (Tresya, D., Mayasari, I., & Suhendra, A. A. 2020).

Namun demikian mempertimbangkan pendekatan politik dalam arena aksi, mulai dari pemilihan calonpimpinan/kepala daerah hingga proses keputusan dan penetapan kebijakan publik telah disadari sebagai jalan keluar untuk meredam aksi korupsi SDA. (Kartodihardjo, H., Ariati, N., & Abdullah, M.(2020).Hal ini menjadi penting karena ruang-ruang tersebut merupakan lahan dominasi oligark bermain selama ini. Tapi disatu sisi tidaklah mudah mengubah budaya klientelistik dalam kehidupan masyarakat dan politisi, hal ini karena Kepentingan

bisnis kelompok oligarki telah berpadu dengan kekuatan politik di tingkat pemerintahan.

Sebenarnya para elit politisi yang diberi kekuasaan, prestise dan kekayaan dari hasil kemenangan pemilu sejatinya juga merasa cemas dengan pola demokrasi yang berjalan di Indonesia. Disatu sisi mereka memahami aturan dan profesionalitas sebagai seorang wakil rakyat, dimana mereka menjadi jembatan kepentingan antara masyarakat dan negara, memenuhi kebutuhan masyarakat serta mempercepat arus pembangunan, tapi disisi lain mereka juga harus toleran dengan melanggar aturan demi mendapatkan “dana gelap”. Hal ini akibat dari begitu kuatnya tekanan permintaan konstituen mereka akan uang tunai, dan takut jika tidak diakomodir maka mereka memiliki peluang kalah dari pesaingnya. Konteks inilah yang menyebabkan mengapa para politisi yang terpilih sangat bergantung dengan pendanaan oligark dan memperjuangkan kepentingan mereka pada proses kebijakan secara habis-habisan.

Mulusnya jual beli politisi dan kebijakan di Indonesia juga ditunjang lemahnya bentuk perlawanan masyarakat itu sendiri. Rendahnya tingkat *Trust*, reputasi dan akuntabilitas dari masyarakat kepada lembaga Negara ditenggarai sebagai alasan utama dari beberapa alasan lain, mengapa praktek politik klientelistik mengakar kuat dimasyarakat. Berdasarkan hasil survey Indo Barometer tahun 2020 menunjukkan bahwa lembaga Negara seperti MPR, DPR, DPD serta Polri berada paling bawah dalam ukuran kepercayaan publik, bahkan lembaga intermediary seperti partai politik nyaris tidak memiliki kekuatan akar rumput yang mapan. Kelompok-kelompok ekstra parlemen seperti NU, Muhammadiyah dll yang digadang gadang dapat menjadi saluran alternatif bagi perjuangan kepentingan masyarakat nyatanya tidak dapat berbuat banyak karena ikut serta dalam pembagian kue-kue kekuasaan.

Jika mengacu pada idealitas demokrasi yang substansial, tentunya pertarungan politik yang mengarah pada keuntungan materil oligark harus dapat dihentikan, hal ini agar potensi kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial dan ekonomi hingga perencanaan pembangunan yang lemah serta korupsi tidak terus menerus menjadi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Diplomasi lingkungan yang dituangkan dalam pendidikan lingkungan sangat diperlukan saat

ini dalam upaya menekankan pemahaman nilai-nilai baru dalam pengelolaan SDA dengan memperhatikan peningkatan kepekaan sosial, empati, dukungan, kepedulian serta pembelaan dari aktor utama/politisi-politisi yang terlibat langsung didalam proses perebutan kekuasaan dan pembuatan kebijakan, maupun aktor lain diluar dari lembaga Negara maupun partai politik.

Gagasan dalam kajian ini sejatinya berupaya untuk mendorong nilai infus pendidikan lingkungan terintegrasi pada tiga ranah aspek utama yakni; Pertama, Mendorong Aktivisme Masyarakat Pro Lingkungan, Kedua pengembangan Kurikulum pendidikan lingkungan di sekolah partai politik, dan Ketiga, pendekatan politik pro lingkungan dalam proses kebijakan sektor sumber daya (SDA).

Gambar 2. Pendidikan Lingkungan Terintegrasi



Sumber Data: data diolah oleh peneliti, 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak era soeharto tumbang 1998 dan beralih ke zaman transisi reformasi, demokratisasi berjalan dengan “mandeg” (mietzner 2012), sebagian besar kajian ilmiah melihat akar persoalan tersebut berasal dari perilaku para elite yang haus akan keuntungan dan kekuasaan. Alih alih, dalam hal ini memahami karakter hak warga Negara dan partisipasi politik menjadi dua kajian kunci untuk mengetahui sejauh mana relasi keduanya, terutama dalam memandang lingkungan. Perjuangan hak di Indonesia sejatinya semakin menguat ketika berbagai aturan perundang-undangan disahkan oleh pemerintah, dengan adanya aturan tersebut memungkinkan masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses hak-hak pribadinya. Namun demikian pada periode berjalan justru muncul upaya “pembelengguan” hak warga oleh Negara dengan konsep dan sampul yang baru. Kita dapat melihat banyak contoh dari kegagalan warga mengakses hak mereka

seperti kesulitan masyarakat desa dalam melindungi tanah mereka dari perluasan konsesi kelapa sawit dan pertambangan (Cramb dan Mc Carthy 2016).

Melihat banyaknya kasus tersebut diatas sejatinya memungkinkan perlunya perlawanan dari masyarakat itu sendiri. perlawanan ini sejatinya merupakan bagian dari usaha menyadarkan masyarakat secara keseluruhan hingga pemerintah yang cenderung abai dalam memenuhi hak konstitusional warganya. namun upaya perlawanan tersebut tidak mengambil jalur perlawanan secara frontal melalui aksi-aksi demonstrasi dengan tuntutan secara radikal, tetapi mengelola ruang-ruang publik yang selama ini dibajak oleh aktor dominan dengan gerakan diskursus, wacana dan kebudayaan (scott, 2009). Isu diskriminasi SDA didorong dalam setiap perdebatan diruang publik. Organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat menjadi motor penggerak utama dalam mendorong aktivisme masyarakat dengan melakukan gerakan bersama (kolaboratif). bentuk kolaborasi yang dilakukan diantaranya adalah diskusi, pernyataan pers bersama, audiensi dengan pemerintah dan lembaga perwakilan. kerjasama antar stakeholder ini dapat dilakukan diruang publik bersamaan dengan momen tertentu yang berkaitan dengan lingkungan. gerakan sipil ini diharapkan bekerja secara masif dalam membentuk opini diruang publik sampai kepada tahap advokasi kebijakan.

Namun demikian seringkali perlawanan aktivis masyarakat pro lingkungan selalu dihadapkan pada kelompok masyarakat yang memiliki hubungan mesra dengan pemerintah dan oligark. oleh karenanya agar gerakan perlawanan ini dapat dikawal hingga proses kebijakan maka diperlukan aktor aktor alternatif yang pro lingkungan untuk bermain diranah kekuasaan formal baik dilegislatif dan eksekutif. untuk bisa menghasilkan aktor alternatif yang pro lingkungan maka partai politik wajib melakukan proses kandidasi secara terbuka dan melakukan pelatihan/pendidikan lingkungan kepada seluruh peserta/kader yang akan mendaftarkan diri baik menjadi calon anggota legislatif maupun kepala daerah.

Proses seleksi kandidasi terbuka memungkinkan masuknya berbagai aktor baru khususnya aktor sipil seperti aktivis lingkungan, kelompok petani dll yang nantinya dipersiapkan dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan SDA didaerah. adanya keterbukaan partai politik dalam proses seleksi kandidasi juga akan mendorong meningkatnya esensi demokrasi. untuk menguatkan aktor yang

terpilih dalam proses kandidasi maka partai politik wajib mengembangkan kurikulum pendidikan lingkungan kepada seluruh kandidat aktor sebelum kontestasi pemilihan umum dimulai. harapannya dari pelatihan dan pendidikan yang dilakukan dapat menghasilkan aktor alternatif yang kuat secara mental dan pengetahuan terutama nilai-nilai baru tentang lingkungan dan kesetaraan.

Konstruksi pewacanaan isu kesetaraan dan keberpihakan dalam kebijakan sektor sumber daya alam (SDA) sebagai isu publik adalah awalan penting dalam konstestasi pewacanaan isu SDA tersebut pada ranah penentuan kebijakan. hal ini dimungkinkan karena ada aktor yang mendukung cara pikir yang mendukung wacana tersebut dan aktor yang tidak mendukung cara pikir wacana tersebut. Aktor yang tidak mendukung wacana tersebut diatas biasanya telah terkontaminasi dengan kebiasaan menerima gratifikasi dari pengusaha atau politik "balas jasa". kekuatan kelompok penganut narasi berbeda akan mendorong wacana tandingan dengan berbagai cara dengan tetap mengendalikan anggota-anggota lainnya agar mendorong narasi yang dianutnya. kontestasi narasi ini pada akhirnya akan mengarah kepada terwujudnya keinginan/kepentingan pengusaha tersebut. dalam hal ini ketiga aspek diatas sangat penting untuk dilihat dan diperbaiki. pertama narasi yang dibangun harus pro lingkungan dan kepentingan petani, oleh karenanya akademisi dan aktor gerakan (alternatif) juga ikut terlibat dalam mewacanakan narasi tersebut dalam ruang publik. kedua aktor alternatif yang terpilih dari hasil seleksi kandidasi dan penguatan pendidikan lingkungan harus bergerak secara kolektif untuk ikut melawan dengan meyakinkan aktor lainnya untuk bergerak bersama mengecilkan ruang kontestasi oligark bermain dan ketiga faktor interest/kepentingan politik dalam produk SDA sedapat mungkin menguntungkan kepentingan kolektif dan menyuarakan "kebenaran".

SIMPULAN

Pendidikan lingkungan terintegrasi adalah satu cara untuk mengurangi aksi oligarki dalam mendominasi kepemilikan dan pengelolaan alam sumber daya di Indonesia. Mendorong aktivisme komunitas proenvironmental secara tidak langsung bagian dari upaya mengakomodasi gerakan sipil dipelopori oleh alternative aktor dalam melakukan gerakan perlawanan dengan mengelola ruang publik yang sudah ada dibajak oleh aktor dominan dengan wacana, wacana dan

gerakan budaya. Di Selain itu, mendorong pencalonan terbuka proses seleksi oleh partai politik tersebut upaya lain untuk memilah aktor alternatif baru bersiaplah secara mental dan berpengetahuan melalui penerapan lingkungan kurikulum pendidikan di sekolah partai politik. Dengan seleksi dan pendidikan yang kuat, ini aktor sebenarnya akan siap untuk berbicara kebenaran, membangun dan menjaga setiap narasi dan perjuangan kebijakan pro lingkungan melawan dominasi oligarki.

DAFTAR PUSTAKA

- Berenschot, W., & Purba, D. (2014). Lampung's sugar-coated elections. *Inside Indonesia*, 117.
- Kesuma, A. S., Risdiana, A., Ramadhan, R. B., & Nawawi, I. (2020). The Oligarchic Politic of Chinese Indonesians in Lampung. *Talent Development & Excellence*, 12(1).
- Kushendrawati, S. M. (2010). Masyarakat konsumen sebagai ciptaan kapitalisme global: Fenomena budaya dalam realitas sosial. *Hubs-Asia*, 10(1).
- Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181-197.
- Pakpahan, A. (1989). Perspektif Ekonomi Institusi Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 34(4).
- Junaidi, J., & Zulgani, Z. (2011). Peranan Sumberdaya Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 3, 27-33.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*, (96), 35-57.
- Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives. *Development and change*, 35(4), 697-718.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets* (Vol. 3). Psychology Press.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nota Sintesis Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. KPK.2020.

- Tresya, D., Mayasari, I., & Suhendra, A. A. (2020). Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2-2), 15-31.
- Kartodihardjo, H., Ariati, N., & Abdullah, M. (2020). Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2-2), 33-47.
- Cahyono, E., Sulistyanto, S., & Azzahwa, S. (2020). Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2-2), 75-92.
- Luthfi, A. N. (2013). EKSKLUSI DAN INKLUSI SEBAGAI DUA SISI MATA UANG. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, (37), 195-199.